BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 157 /KPTS/04/2022

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2022-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran angka II huruf c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan tugas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi diamanatkan untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021 dijelaskan peta jalan dan rencana aksi disusun dengan strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6736);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/324/B.04/HK/2022 tentang Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024;

4. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 500/5713/Bangda tanggal 13 Desember 2021 Hal Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Periode Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi setiap Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pengendalian inflasi.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	D. Ketahanan P.	
7	D. Perkebunan	
8	D. Perikanan	
9	D. TPH	
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	D. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 157 /KPTS/04/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

PETA JALAN
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2022-2024

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
1.	Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar rakyat	Ketersediaan Pasokan dan pemantauan harga 48 kali setahun	Ketersediaan Pasokan dan pemantauan harga 48 kali setahun	Ketersediaan Pasokan dan pemantauan harga 48 kali setahun	Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten	Operasi pasar dilaksanakan 3 kali dalam setahun	Operasi pasar dilaksanakan 3 kali dalam setahun	Operasi pasar dilaksanakan 3 kali dalam setahun	Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Pelayanan Informasi Pemasaran	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium (KPSH-BM)	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 300 ton Beras Medium	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 300 ton Beras Medium	Pelaksanaan KPSH-BM sebanyak 300 ton Beras Medium	Bulog Drive Lampung

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	Dinas Ketahanan Pangan
2.	Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana produksi dan alat mesin pertanian di 15 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana produksi dan alat mesin pertanian di 15 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana produksi dan alat mesin pertanian di 15 Kecamatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan peningkatan produksi dengan penyediaan sarana produksi padi (30 Ha) dan sarana produksi cabe (25 Ha)	Terlaksananya kegiatan peningkatan produksi dengan penyediaan sarana produksi padi (30 Ha) dan sarana produksi cabe (30 Ha)	Terlaksananya kegiatan peningkatan produksi dengan penyediaan sarana produksi padi (30 Ha) dan sarana produksi cabe (30 Ha)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya 8.844,1 Ton	Produksi Perikanan Budidaya 9.309,6 Ton	Produksi Perikanan Budidaya 9.799,6 Ton	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 581,9 Ton, Hanya Ekspor Luar Kabupaten dan Luar Provinsi belum termasuk ekspor ke luar negeri	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 593,9 Ton, Hanya Ekspor Luar Kabupaten dan Luar Provinsi belum termasuk ekspor ke luar negeri	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 605,9 Ton, Hanya Ekspor Luar Kabupaten dan Luar Provinsi belum termasuk ekspor ke luar negeri	Dinas Perikanan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 90%	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 95%	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100%	Dinas Perikanan
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan 5.398,6 Ton	Volume Ekspor Perikanan 5.398,6 Ton	Volume Ekspor Perikanan 5.479,9 Ton	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pengembangan buah-buahan melalui penyediaan bibit unggul sebanyak 3.750 batang	Terlaksananya kegiatan pengembangan buah-buahan melalui penyediaan bibit unggul sebanyak 3.750 batang	Terlaksananya kegiatan pengembangan buah-buahan melalui penyediaan bibit unggul sebanyak 3.750 batang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan pembangunan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi sebanyak 1 Unit	Terlaksananya kegiatan pembangunan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi sebanyak 10 Unit	Terlaksananya kegiatan pembangunan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi sebanyak 10 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	NIHIL	Pelaksanaan Pengawasan penyaluran Pupuk dan pestisida bersubsidi sebanyak 4 kali setahun	Pelaksanaan Pengawasan penyaluran Pupuk dan pestisida bersubsidi sebanyak 4 kali setahun	Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Sikomandan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Operasional pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak),Target Akseptor IB Kab. Lampung Barat sebanyak 1000 ekor	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Operasional pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak),Target Akseptor IB Kab. Lampung Barat sebanyak 1000 ekor	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Operasional pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak),Target Akseptor IB Kab. Lampung Barat sebanyak 1000 ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembinaan langsung ke kelompok peternak pada kegiatan peningkatan populasi ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pemberian bantuan ternak ke kelompok peternak pada kegiatan peningkatan populasi ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Mekanisme Ekspor Impor	Sertifikasi NKV	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Dinas Perkebunan dan Peternakan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Klaster Peternakan	Telah ditetapkan Pekon Ternak melalui keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/KPTS/273/III.11/ 2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Pekon Ternak yaitu Pekon Sinar Jaya, Keamatan Air Hitam dan Pekon Campang, Kecamatan Batu Ketulis.	Telah ditetapkan Pekon Ternak melalui keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/KPTS/273/III.11/ 2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Pekon Ternak yaitu Pekon Sinar Jaya, Keamatan Air Hitam dan Pekon Campang, Kecamatan Batu Ketulis.	Telah ditetapkan Pekon Ternak melalui keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/KPTS/273/III.11/ 2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Pekon Ternak yaitu Pekon Sinar Jaya, Keamatan Air Hitam dan Pekon Campang, Kecamatan Batu Ketulis.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelembagaan pangan yang ditumbuhkan dan dibina 1 Kawasan	Jumlah Kelembagaan pangan yang ditumbuhkan dan dibina 1 Kawasan	Jumlah Kelembagaan pangan yang ditumbuhkan dan dibina 1 Kawasan	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rasio ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan 11 kelompok dan Ketersedian Energi dan Protein wilayah 4000Kkal/kap/hr dan 95 gr/kap/hr	Rasio ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan 11 kelompok dan Ketersedian Energi dan Protein wilayah 4000Kkal/kap/hr dan 95 gr/kap/hr	Rasio ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan 11 kelompok dan Ketersedian Energi dan Protein wilayah 4000Kkal/kap/hr dan 95 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Terlaksanaya pemberian bibit tanaman pekarangan di 20 kelompok peogram pangan lestari	Terlaksanaya pemberian bibit tanaman pekarangan di 20 kelompok peogram pangan lestari	Terlaksanaya pemberian bibit tanaman pekarangan di 20 kelompok peogram pangan lestari	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	tersedinya Cadangan pangan pemerintah daerah yang terpelihara sebayak 50 ton	tersedinya Cadangan pangan pemerintah daerah yang terpelihara sebayak 50 ton	tersedinya Cadangan pangan pemerintah daerah yang terpelihara sebayak 50 ton	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Pengadaan Gabah untuk CPP 10 ton	Jumlah Pengadaan Gabah untuk CPP 10 ton	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah lokasi sosialisasi keamanan PSAT 5 kecamatan	Jumlah lokasi sosialisasi keamanan PSAT 5 kecamatan	Jumlah lokasi sosialisasi keamanan PSAT 5 kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan Cadangan Pangan	Penyerapan Gabah/Beras	Penyerapan 500 ton setara beras	Penyerapan 500 ton setara beras	Penyerapan 500 ton setara beras	Bulog Drive Lampung
3.	Kelancaran Distribusi	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan Pemantaun Harga, stoc pangan di 4 titik pantau	Pelaksanaan Pemantaun Harga, stoc pangan di 4 titik pantau	Pelaksanaan Pemantaun Harga, stoc pangan di 4 titik pantau	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	Monitoring Perkembangan Data Harga Komoditas Pangan tingkat petani dan eceran setiap hari selama 12 bulan	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Dinas Perkebunan dan Peternakan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Supply Demand HBKN Idul Fitri, Idul Adha dan Nataru	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Pelayanan kesmavet dan operasional RPH)	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Ishiknas	Petugas pelapor iSIKHNAS dianggarkan dalam Anggaran Disnakkeswan Provinsi Lampung; Untuk Tahun 2022 melalui dana DAK Non Fisik Operasional Puskeswan, terdapat juga alokasi untuk petugas iSIKHNAS berupa paket data untuk pelaporan.	Petugas pelapor iSIKHNAS dianggarkan dalam Anggaran Disnakkeswan Provinsi Lampung; Untuk Tahun 2022 melalui dana DAK Non Fisik Operasional Puskeswan, terdapat juga alokasi untuk petugas iSIKHNAS berupa paket data untuk pelaporan.	Petugas pelapor iSIKHNAS dianggarkan dalam Anggaran Disnakkeswan Provinsi Lampung; Untuk Tahun 2022 melalui dana DAK Non Fisik Operasional Puskeswan, terdapat juga alokasi untuk petugas iSIKHNAS berupa paket data untuk pelaporan.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan 1 dokumen	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan 1 dokumen	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan 1 dokumen	Dinas Ketahanan Pangan

OPD | KABAG HUKUM

No.	STRATEGI KUNCI	PROGRAM STRATEGIS	SUB PROGRAM	TIME LINE			PIC
				2022	2023	2024	
			Pelaksanaan pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	-	Intervensi kerawanan pangan 2 pekon	Intervensi kerawanan pangan 2 Pekon	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Publikasi Pengendalian Inflasi	Harga Pangan Strategis (SIHK) 48 Kali	Harga Pangan Strategis (SIHK) 48 Kali	Harga Pangan Strategis (SIHK) 48 Kali	Bagian Perekonomian Setdakab
			Layanan Hubungan Media	Kebijakan TPID 2 Kali	Kebijakan TPID 2 Kali	Kebijakan TPID 2 Kali	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Layanan Hubungan Media	Kegiatan TPID 30 kali	Kegiatan TPID 30 kali	Kegiatan TPID 30 kali	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koordinasi Pusat dan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100% keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100% keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100% keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Koperasi, UKM	
5	D. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	D. Ketahanan P.	
7	D. Perkebunan	
8	D. perikanan	
9	D. TPH	
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS